

RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

T A H U N
2022

Dinas Perhubungan Tanah Bumbu
Tahun 2022

K A T A P E N G A N T A R

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 dapat tersusun.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikatornya, program dan kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program / kegiatan. Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Batulicin , Juni 2022

Plt. KEPALA DINAS

Achmad Marlan, S.Sos

NIP. 19650315 199203 1 019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi.....	
Daftar Gambar.....	
Daftar Tabel.....	
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum.....	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu	
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu	
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu...	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten TanahBumbu	
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.....	
Bab V Penutup.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 2.2	Rekapitulasi Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 2.3	Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 2.5	Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun 2022
Tabel 2.6	Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Tabel 3.1	Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
Tabel 3.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

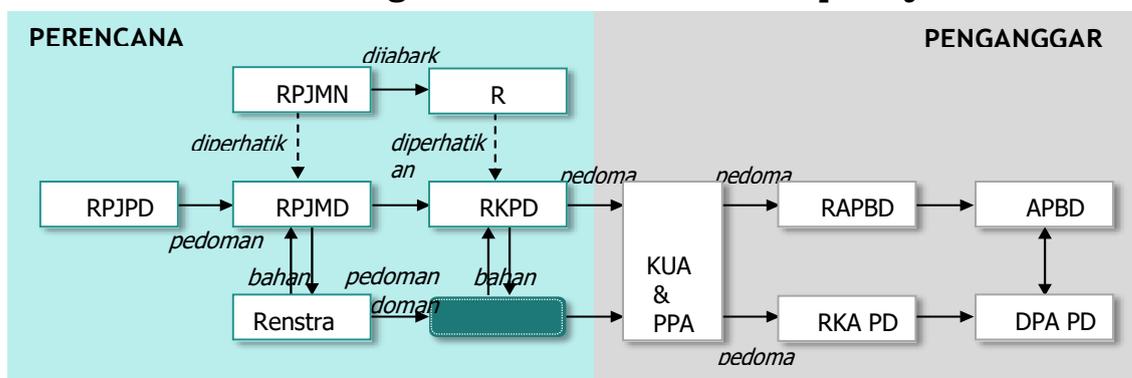
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Adapun muatan dari Renja Perubahan disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 juga mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022. Dimana penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD; dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan, termasuk evaluasi terhadap output pada Renja Perubahan Tahun 2022.

Selanjutnya Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13));
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perhubungan;
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 22);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu di Tahun 2022, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022;

- 1.4 Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI
RENJA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN LALU

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN TANAH BUMBU TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN

Kualitas Renja Perubahan perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja Perubahan yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2025.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan 3 program dan 10 kegiatan, sebagaimana tercantum pada Perubahan Renja Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “**Indeks Kepuasan** terhadap Internal Peranmgkat Daerah“

“dengan target tahun 2021 sebesar 100 % dan realisasi sebesar 100% (capaian 92,74 %).

Pada program ini terdapat 3 kegiatan dan 15 Sub kegiatan , dimana target indikator kinerja dari seluruh kegiatan tersebut masih mencapai rata-rata 92,67 %.

- 2) **Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “**Persentase Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Jalan**” dengan target tahun 2021 sebesar 54,82% dan realisasi sebesar 49,70 % (capaian 78,98%).

Pada program ini terdapat 5 kegiatan dan 9 sub Kegiatan , dimana target indikator kinerja dariseluruh kegiatan dan Sub Kegiatan

- 3) **Program Pengelolaan Pelayaran**
Indikator kinerja outcome pada program ini adalah “**Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai**” dengan target tahun 2021 sebesar 16,88 % dan realisasi sebesar 16,88% (capaian 100%).

Pada program ini terdapat 1kegiatan dan 1 Sub kegitan , dimana target indikator kinerja dari kegiatan tersebut telah tercapai 16,88 %.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu tersaji dalam Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra (2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2020)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2021	
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
01.02	▪ Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan	Terbayarnya rekening kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.06	▪ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.07	▪ Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.08	▪ Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.09	▪ penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.10	▪ penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.11	▪ penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.12	▪ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.13	▪ penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.15	▪ Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terbayarnya Surat Kabar	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.16	▪ Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya logistik kantor	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.17	▪ penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.18	▪ rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.19	▪ Penyediaan jasa tenaga non PNS	Tersedianya jasa tenaga non PNS	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
01.22	▪ rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%

02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
02.05	▪ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0%	0	0	0%
02.10	▪ Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur Kantor	109 Unit	19 Unit	20 Unit	0%	0,00%	0	0	0%
02.22	▪ Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kedisiplinan aparatur dalam kehadiran penggunaan atribut pegawai	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
03.02	▪ Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	150 Stell	0,00	150 Stell	0,00	0%	0	0	0%
03.03	▪ Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia	25 stell	0,00	25 stell	0,00	0%	0	0	0%
03.05	▪ Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	175 Stell	0,00	175 Stell	0,00	0%	0	0	0%
	Perhubungan									
15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang tersedia	100%	75,00%	92,31%	87,50%	94,79%	0,00%	0%	0%
15.01	▪ Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	66,67%	0	0	0%
15.07	▪ Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah Pos Jaga yang dibangun	1 Unit	0	1 Unit	0	0%	0	0	0%
15.09	▪ Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara	Jumlah fasilitas penunjang bandara	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0	0	0%
16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%
16.01	▪ Rehabilitasi/Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat uji kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara	11 Unit	1 Unit	5 Unit	11 Unit	220%	0	0	0%
16.02	▪ Pemeliharaan/rehabilitasi Prasarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah prasarana balai uji kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara	2 Unit	0%	1 Unit	0	0%	0	0	0%
16.03	▪ Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	jumlah terminal yang dipelihara	14 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	0	0	0%
17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum dan jalan	8,38%	12,79%	10,35%	10,32%	99,71%	0%	0%	0%
17.05	▪ Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah angkutan umum/barang yang melanggar disiplin pengoperasian	139 Kendaraan	164 Kendaraan	139 Kendaraan	139 Kendaraan	100%	0	0	0%

17.15	▪ Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Terpilihnya Awak Angkutan Teladan	3 Orang	0,00	3 Orang	0,00	0%	0	0	0%
17.....	▪ Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	3 Orang	0,00	3 Orang	0,00	0%	0	0	0%
17.....	▪ Pengendalian dan Monitoring Parkir di Tepi Jalan Umum	Jumlah juru parkir yang dibina dan dimonitoring	135 Orang	0,00	135 Orang	0,00	0%	0	0	0%
18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	100,00%	0,00	76,47%	42,11%	55,07%	0%	0%	0%
18.01	▪ Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang terbangun	4 unit	0,00	1 unit	0,00	0%	0	0	0%
18.02	▪ Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Jumlah halte yang terbangun	6 unit	0,00	2 unit	0,00	0%	0	0	0%
18.03	▪ Pembangunan Dermaga	Jumlah dermaga yang	6 unit	0,00	1 unit	2 Unit	200%	0	0	0%
19	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas yang terpasang	100%	62,34%	81,79%	76,15%	93,10%	0%	0%	0,00%
19.01	▪ Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas yang terpasang	1638 Unit	63 Unit	298 Unit	79 Unit	26,51%	0	0	0%
19.02	▪ Pengadaan Marka Jalan	Panjang Marka Jalan	78043 M'	4759 M'	10500 M'	2100 M'	20%	0	0	0%
19.03	▪ Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Panjang Pagar Pengaman Jalan	76 M	16 M	16 M	16 M	100%	0	0	0%
19....	▪ Pengadaan PJU	Jumlah Titik PJU yang terpasang	150 Unit	210 Unit	50 Unit	218 Unit	436%	0	0	0%
20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase angkutan yang memenuhi laik jalan	67,09%	51,92%	57,49%	35,98%	62,58%	0%	0%	0%
20.01	▪ Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah balai uji dan bangunan pendukung yang terbangun	1 Unit	0,00	1 Unit	1 Unit	100%	0	0	0%
20.02	▪ Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan	11 Unit	7 Unit	3 Unit	1 Unit	33,33%	0	0	0%
20.04	▪ Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Jumlah perlengkapan alat pengujian kendaraan	62000 buah	13000 Buah	13200 Buah	3500 buah	26,92%	0	0	0%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

Tabel 2.2
Rekapitulasi Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2021
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021		
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/4)x100
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah (Indeks)	100%		100%		
2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terselenggara dengan baik	100%		100%		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 bulan		12 bulan	6 bulan	50,00%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan		12 bulan	6 bulan	50,00%
2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administrasi dan disiplin Pegawai Perangkat Daerah	100%		100%		
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	965 stell		159 stell	0	0,00%
2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan		12 bulan	6 bulan	50,00%
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	176 unit		27 unit	4 Unit	14,81%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan		12 bulan	6 bulan	50,00%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan		12 bulan	6 bulan	50,00%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	144 Exm		24 Exm	6 Exm	25,00%
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	431 OK		54 OK	29 OK	53,70%
2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan	100%		100%		
5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	158 unit		25 unit	15 unit	60,00%
2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%		100%		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat	12 bulan		12 bulan	6 bulan	50,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan		12 bulan	6 bulan	50,00%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 bulan		12 bulan	6 bulan	50,00%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan		12 bulan	6 bulan	50,00%

2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%		100%		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	12 bulan		12 bulan	6 bulan	50,00%
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	4 Unit		4 Unit	0	0,00%
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100,00%
15,02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Terpenuhinya Pasivitas Perengkapan Jalan dan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Jalan	100,00%		54,06%		
2,02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan kabupaten yang memenuhi syarat teknis keselamatan keamaan dan kenyamanan	16,49%		14,23%		
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rambu rambu Lalu Lintas yang terpasang	4172 Unit		294 Unit	0	0,00%
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang dipelihara	2894 Unit		1821 Unit	684	37,56%
2,03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal yang dikelola	100,00%		19,35%		
2	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	12 unit		1 unit	0	0,00%
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dibangun	19 unit		3 unit	0	0,00%
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang di pelihara/ direhabilitasi	10 unit		2 unit	0	0,00%
2,04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Parkir yang diterbitkan	95 titik		71 titik		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya fasilitas parkir publik yang terintegrasi	150 Buah		15 Unit	0	0,00%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	265 OK		30 OK	46 OK	153,33%
2,05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang laik jalan	100,00%		19,35%		
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	21 Unit		1 Unit	0	0,00%
4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik)	45000 Buah		5000 Buah	5126 Buah	102,52%
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara	12 Unit		12 Unit	0	0,00%
2,09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota	Persentase jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang	100,00%		53,06%		
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang yang aktif	490 Dokumen		260 Dokumen	0	0,00%
2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan Pengawasan LLAJ	720 OK		120 OK	54 OK	45,00%
2,11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek yang ditetapkan	100,00%		79,17%		
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan	24 Dokumen		1 Dokumen	0	0,00%

15,03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai	100,00%		54,06%		
2,02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ijin Usaha Angkutan Sungai Yang di Terbitkan	21 Dokumen		0		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan	275 OK		0	0	0,00%
2,13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase dermaga yang dibangun	100,00%		0		
1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pelabuhan	75 OK		0	0	0,00%
2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah dermaga yang dibangun	20 unit		2 unit	0	0,00%
3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan sungai yang dipelihara	10 unit		0	0	0,00%
4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pengawasan Pelabuhan Sungai	90 OK		0	0	0,00%
2,17	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Ijin Pengerukan yang dikeluarkan	6 Dokumen		0		
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengerukan	260 OK		0	0	0,00%
2,19	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Ijin Pengelolaan TUKS	30 Dokumen		0		
2	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan TUKS	125 OK		0	0	0,00%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

b. **Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan**

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 tersaji pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Realisasi Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2021/2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	SELISIH ANGGARAN (Rp)
URUSAN		24.091.234.617,00	23.455.009.886,00	97,36%	636.224.731,00
Belanja Tidak Langsung		4.808.766.117,00	4.665.854.281,00	97,03%	142.911.836,00
Belanja Pegawai		4.808.766.117,00	4.665.854.281,00	97,03%	142.911.836,00
1	Gaji dan Tunjangan	2.943.326.117,00	2.899.007.731,00	98,49%	44.318.386,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	1.865.440.000,00	1.766.846.550,00	94,71%	98.593.450,00
Belanja Langsung		19.282.468.500,00	18.789.155.605,00	97,44%	493.312.895,00
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14.296.153.500,00	13.912.689.805,00	97,32%	383.463.695,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.006.700.000,00	9.939.403.874,00	99,33%	67.296.126,00
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	200.800.000,00	161.049.300,00	80,20%	39.750.700,00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	292.350.000,00	241.736.745,00	82,69%	50.613.255,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	29.654.200,00	28.279.200,00	95,36%	1.375.000,00
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.700.000,00	2.945.000,00	27,52%	7.755.000,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	52.218.000,00	52.218.000,00	100,00%	0,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.854.200,00	7.044.600,00	89,69%	809.600,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.187.100,00	1.187.100,00	100,00%	0,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	184.500.000,00	180.460.000,00	97,81%	4.040.000,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.140.000,00	1.080.000,00	94,74%	60.000,00
11	Penyediaan bahan logistik kantor	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00%	0,00
12	Penyediaan makanan dan minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00%	0,00
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	92.400.000,00	75.506.686,00	81,72%	16.893.314,00
14	Penyediaan jasa tenaga non PNS	3.281.000.000,00	3.086.129.300,00	94,06%	194.870.700,00
15	Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah	114.600.000,00	114.600.000,00	100,00%	0,00

B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	74.200.000,00	74.050.000,00	99,80%	150.000,00
1	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	74.200.000,00	74.050.000,00	99,80%	150.000,00
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	0,00	0,00%	0,00
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00%	0,00
D	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	354.000.000,00	351.579.000,00	99,32%	2.421.000,00
1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	308.800.000,00	306.779.000,00	99,35%	2.021.000,00
2	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	0	0,00	0,00%	0,00
3	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Udara	45.200.000,00	44.800.000,00	99,12%	400.000,00
E	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	109.800.000,00	107.730.000,00	98,11%	2.070.000,00
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	63.100.000,00	61.030.000,00	96,72%	2.070.000,00
2	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	46.700.000,00	46.700.000,00	100,00%	0,00
F	Program peningkatan pelayanan angkutan	470.100.000,00	417.550.000,00	88,82%	52.550.000,00
1	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	470.100.000,00	417.550.000,00	88,82%	52.550.000,00
2	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	0,00	0,00	0,00%	0,00
G	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1.507.550.000,00	1.504.850.000,00	99,82%	2.700.000,00
1	Pembangunan Dermaga *)	1.507.550.000,00	1.504.850.000,00	99,82%	2.700.000,00
H	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.195.915.000,00	2.149.186.800,00	97,87%	46.728.200,00
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	274.815.000,00	249.175.350,00	90,67%	25.639.650,00
2	Pengadaan marka jalan	101.500.000,00	89.300.000,00	87,98%	12.200.000,00
3	Pengadaan pagar pengaman jalan	60.700.000,00	59.884.450,00	98,66%	815.550,00
4	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	1.758.900.000,00	1.750.827.000,00	99,54%	8.073.000,00
5	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan LLAJ	0,00	0,00	0,00%	0,00
I	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	274.750.000,00	271.520.000,00	98,82%	3.230.000,00
1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	202.250.000,00	202.020.000,00	99,89%	230.000,00
2	Pengadaan Perlengkapan Alat Uji Kendaraan Bermotor	72.500.000,00	69.500.000,00	95,86%	3.000.000,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, 2022

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2021, aspek dukungan dana yang digunakan dalam

membiyai 1 (satu) urusan, 3 program,... kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar **Rp** Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar **Rp** (.....%) dengan sisa sebesar **Rp** (..... %), dengan uraian sebagai berikut :

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan adalah melaksanakan fungsi sebagai urusan pemerintahan bidang perhubungan di Kabupaten Tanah Bumbu, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2025. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun 2020

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI				PROYEKSI
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
TUJUAN : Meningkatkan keselamatan transportasi angkutan											
SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dan lalu lintas angkutan orang dan barang	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Angkutan Orang dan	13,45%	19,52%	15,80%	12,79%	10,35%	13,45%	19,52%	15,72%	12,79%	10,32%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan “ Mewujudkan Peningkatan kualitas layanan transportasi ” memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Pertumbuhan PDRB sektor transportasi dan pergundangan ”, dengan target 8,05%
- b. Sasaran “Meningkatnya konektifitas moda transportasi kabupaten” memiliki 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut :
 - 1) Indikator “Persentase meningkatnya fasilitas keselamatan jalan ” dimana realisasinya sebesar 18,18% dari target sebesar 14,23%;
 - 2) Indikator “ kinerja lalu lintas kabupaten” dimana realisasinya sebesar 0,30% dari target sebesar 0,27%;
 - 3) Rasio Konektifitas kabupaten/Kota dimana realisasinya sebesar 95,20% dari target sebesar 94,46%;

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan fungsinya di bidang Perhubungan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Sampai Dengan Tahun 2020
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA			PROYEKSI 2021	CATATAN ANALISIS
			2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020		
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017												
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	501773	478053	464191	191826	206313	227984	128816	50750	239383	
2	Rasio ijin trayek	%	0,0016	0,0016	0,0016	0,0011	0,0011	0,0009	0,0009	0,0009	0,001	
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Buah	7124	7674	8249	2158	2628	8001	4460	2158	8401	
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	Persentase layanan angkutan darat	%	0,14	0,14	0,13	1,81	1,95	1,55	1,17	1,81	1,48	
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	20,41	13,06	4,08	10,34	13,12	32,24	40,93	10,36	33,86	
7	Pemasangan Rambu- rambu	%	8,3	24,78	24,6	8,52	11,54	0,09	8,52	1,05	0,09	
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,0349	0,0366	0,0383	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,022	
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	368436	338961	318623	191826	206313	31560	33087	21280	33138	
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	501773	478053	464191	227984	235275	227984	228768	228768	239383	
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020												
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0	0	0	93	93,73	0	0	93	94	
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0	0	0	0,22	0,24	0	0	0,22	0,32	

Dari tabel di atas, digambarkan layanan Dinas Perhubungan berdasarkan dari capaian IKK Perhubungan Perhubungan pada kurun waktu 2017-2021. Secara umum, capaian IKK Perhubungan sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 dan Permendagri 18 tahun 2020 sebagian besar mencapai target yang ditetapkan, ada beberapa indikator-indikator yang belum tercapai yaitu :

1. Jumlah Arus penumpang angkutan Umum dengan formulasi jumlah Arus penumpang angkutan Umum yang masuk dibagi keluar daerah selama 1(satu) tahun, belum tercapai yaitu pada tahun 2021 pada tahun 2021 dari target 191826 orang realisasinya sebesar 57350 orang
2. Rasio Ijin trayek dengan formulasi Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibagi jumlah penduduk, belum tercapai target, dari target 0,0011% dengan realisasi 0,0013%.
3. Jumlah uji kir angkutan umum tercapai dari target dengan formulasi jumlah uji kir merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan /atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan dijalan agar memenuhi persyaratan teknis dan alik jalan pada tahun 2021 tercapai target, target 2628 dengan realisasi 9767
4. Jumlah Pelabuhan/ laut /udara /terminal bis sebanyak 5 unit
5. Persentase layanan angkutan darat dengan formulasi Jumlah angkutan Darat /jumlah penumpang angkutan darat X 100 pada tahun 2021 tercapai dari target 1,81 dengan realisasi 1,81 %
6. Persentase kepemilikan kir angkutan umum dengan formulasi jumlah angkutan umum yang tidak memiliki kIR pada tahun n / jumlah angkutan umum pada tahun n x 100% pada tahun 2021 target tercapai dari target 13,12 realisasi 97,69%
7. Pemasangan Rambu-rambu dengan formulasi jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n / jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia x 100% tercapai pada tahun 2021 dengan target 11,54% realisasi 0,08%
8. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dengan formulasi Panjang jalan / jumlah kendaraan dari target 0,023 realisasi 0,023
9. Jumlah orang atau barang yang terangkut angkutan umum dengan formulasi Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum belum tercapai targetnya, dari target 206313 orang dengan realisasi 15854 orang belum tercapai karena adanya pandemic Covid-19 yang melanda sehingga

menimbulkan dampak pada masyarakat tidak berpergian dan beraktifitas menggunakan kendaraan pribadi serta adanya pembatasan untuk melakukan bepergian keluar daerah.

10. Jumlah orang atau barang melalui dermaga atau bandara atau terminal per tahun dengan formulasi Jumlah orang/ barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun sudah mencapai target, dari target 235275 orang dengan realisasi 446625 orang sudah tercapai.
11. Rasio Konektifitas kabupaten Kota dengan formulasi Rasio Konektifitas kabupaten = {IK 1 (angkutan jalan) x bobot angkutan jalan} + {IK 2 (angkutan sungai, danau dan penyebrangan) x bobot angkutan sungai danau dan penyebrangan } mencapai 93.
12. Kinerja lalu lintas kabupaten /kota dengan formulasi Jumlah pemasangan pesangan perlengkapan jalan kabupaten atau kota / target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten atau kota x 100% mencapai 0,25

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Perubahan Renja Tahun 2020 maupun Renstra Tahun 2016-2021 sebagian besar tidak tercapai diantaranya dalam pengelolaan terminal type B yang Terhitung mulai Oktober 2016, kewenangan terminal tipe B diambil alih oleh Pemerintah Propinsi terhitung Mulai 1 Oktober 2015, Terminal Sungai Kecil dimutasikan ke Distanpanak dan ditukar dengan Kantor Bantu Angsana (Lahan & Bangunan).

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Dinas Perhubungan diantaranya :

- a. Belum optimalnya fasilitas sektor perhubungan
- b. Masih tingginya pelanggaran angkutan umum di jalan
- c. Belum adanya pengawasan dan pengendalian lalu lintas perairan sungai dan danau
- d. Terjadi penurunan penumpang transportasi umum
- e. Masih sedikitnya trayek yang melayani angkutan umum
- f. Meningkatnya permintaan angkutan barang
- g. Masih sedikitnya layanan angkutan umum didarat

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya di tahun 2022 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan
Pertumbuhan pembangunan jalan kabupaten yang tidak disertai dengan pemasangan fasilitas keselamatan jalan menjadi program prioritas bagi Dinas Perhubungan untuk mengupayakan peningkatan fasilitas keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan.
- 2) Optimalisasi pengendalian dan pengawasan LLAJ
Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam berkendara dalam menaati peraturan lalu lintas di jalan raya menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas, sehingga dengan adanya pengendalian dan pengawasan LLAJ diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran.
- 3) Masih kurangnya jaringan trayek yang melayani seluruh wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu
Luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang tersebar dari beberapa kecamatan yang menghubungkan antara pusat kecamatan dengan kabupaten, diharapkan dengan adanya jalur trayek baru dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.

b. Peluang

1) Pendanaan melalui APBN/APBD I/CSR

Keterbatasan dana dalam peningkatan sarana dan prasarana perhubungan melalui APBD Kabupaten menjadi peluang utama untuk pengajuan proposal program dan kegiatan melalui pendanaan APBN/APBD I/CSR mengingat sebagian besar jalan yang diberada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Jalan Nasional dan Provinsi, diharapkan melalui pendanaan tersebut sarana dan prasarana perhubungan dapat terpenuhi.

2) Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan

Dengan adanya sosialisasi akan pentingnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan, menjadi prioritas Dinas Perhubungan dalam mewujudkan *Zero Accident*.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu.
Pencapaian visi dan misi Bupati dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu beserta indikator dan targetnya. Dinas Perhubungan membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan kebijakan daerah dibidang perhubungan, pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perhubungan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan, pelaksanaan administrasi Dinas, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi Bupati. Karena itu Dinas Perhubungan perlu memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya- upaya pengkoordinasian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

b. Pandemi COVID-19 beserta Dampaknya

Terkait terjadinya pandemi COVID-19, Dinas Perhubungan perlu mengkoordinasikan perencanaan tahun 2022 dalam rangka pemulihan paska pandemi. Selain itu pandemi tersebut juga menyebabkan dilakukannya realokasi anggaran pada tahun 2021, dimana alokasi anggaran dari beberapa output strategis harus ditunda pelaksanaannya. Terkait hal ini, Dinas Perhubungan perlu mengkoordinasikan penganggaran kembali output strategis tersebut pada tahun 2022.

c. Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan Dinas Perhubungan

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan terhadap	100%	18.591.547.029	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Tanah Bumbu	Indeks Kepuasan terhadap	100%	20.579.546.953	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	7.378.110.047	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	6.951.008.443	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Bumbu	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 bulan	5.348.759.142	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Bumbu	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	12 bulan	4.921.071.584	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanah Bumbu	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	2.029.350.905	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tanah Bumbu	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	2.029.936.859	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Tertib administrasi dan disiplin Pegawai	100%	52.470.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Tertib administrasi dan disiplin Pegawai	0%	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	161 stel	52.470.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	0	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	735.066.036	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	514.373.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang	12 bulan	2.465.540	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	12 bulan	993.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	27 unit	203.251.775	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	9 unit	98.730.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	127.342.710	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	112.700.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanah Bumbu	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	19.982.710	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tanah Bumbu	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	13.732.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Exm	2.904.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	24 Exm	2.640.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 OK	379.119.301	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 OK	285.577.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik	31,65%	32.917.950	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik	31,65%	18.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Mebel yang diadakan	25 unit	32.917.950	Pengadaan Mebel	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Mebel yang diadakan	14 unit	18.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	100%	9.986.473.145	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan	100%	12.576.820.510	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanah Bumbu	Tersedianya jasa Surat Menyurat	12 bulan	40.989.223	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tanah Bumbu	Tersedianya jasa Surat Menyurat	12 bulan	35.345.600	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Bumbu	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	9.598.194.771	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tanah Bumbu	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	12.193.260.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 bulan	15.610.870	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	12 bulan	10.650.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	331.678.281	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	337.564.910	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	19,57%	406.509.851	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tanah Bumbu	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	19,57%	519.345.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Bumbu	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	12 bulan	211.226.851	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tanah Bumbu	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	12 bulan	254.765.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	4 Unit	93.791.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	1 Unit	53.865.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	1 Unit	101.491.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	1 Unit	210.715.000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan	62,12%	3.345.792.400	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Terpenuhinya Fasilitas	62,12%	3.415.465.690	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Panjang Jalan kabupaten yang memenuhi syarat teknis keselamatan keamanan dan kenyamanan	14,65%	1.054.792.400	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Panjang Jalan kabupaten yang memenuhi syarat teknis keselamatan keamanan dan kenyamanan	14,65%	1.137.662.280	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rambu rambu Lalu Lintas yang terpasang	336 Unit	729.792.400	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rambu rambu Lalu Lintas yang terpasang	62 Unit	887.662.280	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang dipelihara	1927 Unit	325.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang dipelihara	1927 Unit	250.000.000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Tanah Bumbu	Persentase terminal yang dikelola	32,26%	1.500.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Tanah Bumbu	Persentase terminal yang dikelola	32,26%	776.192.930	
	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah terminal yang dibangun	1 unit	1.000.000.000	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah terminal yang dibangun	1 unit	394.712.930	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dibangun	3 unit	300.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dibangun	2 unit	216.215.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah terminal yang di pelihara/ direhabilitasi	2 unit	200.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah terminal yang di pelihara/ direhabilitasi	1 unit	165.265.000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Izin Parkir yang diterbitkan	75 titik	76.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Izin Parkir yang diterbitkan	75 titik	208.165.000	
	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tanah Bumbu	Tersedianya fasilitas parkir publik yang terintegrasi	20 Buah	40.000.000	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Tanah Bumbu	Tersedianya fasilitas parkir publik yang terintegrasi	0	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	40 OK	36.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	50 OK	208.165.000	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Kendaraan yang laik jalan	22,00%	411.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Kendaraan yang laik jalan	22,00%	390.839.430	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	1 Unit	200.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	0	-	

	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Tersedianya BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik)	6000 Buah	150.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Tersedianya BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik)	6000 Buah	276.309.430	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara	12 Unit	61.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara	12 Unit	114.530.000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Persentase jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang	63,27%	281.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Persentase jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang	63,27%	902.606.050	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang yang aktif	310 Izin	44.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang yang aktif	0	-	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah pengendalian dan Pengawasan LLAJ	120 OK	237.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah pengendalian dan Pengawasan LLAJ	108 OK	902.606.050	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Persentase trayek yang ditetapkan	83,33%	23.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Persentase trayek yang ditetapkan	0,00%		
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah penerbitan rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan	1 Izin	23.000.000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah penerbitan rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan	0%	-	
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai	28,57%	527.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai	28,57%	226.715.000	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Ijin Usaha Angkutan Sungai Yang di Terbitkan	1 Izin	35.000.000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Ijin Usaha Angkutan Sungai Yang di Terbitkan	0,00	-	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan	45 OK	35.000.000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan	0	-	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Persentase dermaga yang dibangun	75,00%	480.000.000	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Persentase dermaga yang dibangun	75,00%	226.715.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pelabuhan	5 Izin	15.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pelabuhan	0	-	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah dermaga yang dibangun	2 Unit	400.000.000	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah dermaga yang dibangun	1 Unit	226.715.000	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah pelabuhan sungai yang dipelihara	2 Unit	50.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah pelabuhan sungai yang dipelihara	0	-	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Pengawasan Pelabuhan Sungai	15 OK	15.000.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Pengawasan Pelabuhan Sungai	0	-	
	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Ijin Pengerukan yang dikeluarkan	0,00	0	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Ijin Pengerukan yang dikeluarkan	0,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengerukan	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengerukan	0	-	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Ijin Pengelolaan TUKS	6 Izin	12.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Ijin Pengelolaan TUKS	0,00		
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan TUKS	15 OK	12.000.000	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam	Kab. Tanah Bumbu	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan TUKS	0	-	
JUMLAH					22.464.339.429	JUMLAH					24.221.727.643

SUMBER : Dinas Perhubungan , Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2022 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2021, yaitu melalui Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan.

Khusus untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kab. Tanah Bumbu	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Perlengkapan Jalan	62,12%	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Panjang Jalan kabupaten yang memenuhi syarat teknis keselamatan keamanan dan kenyamanan	14,65%	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	Jumlah Rambu rambu Lalu Lintas yang terpasang	85 unit	
	• Pemasangan PJU Jalan Poros	Kuranji		20 unit	
	• Pemasangan PJU Jalan Poros	Karang Bintang		10 unit	
	• Pemasangan PJU Jalan Poros	Mantewe		10 unit	
	• Pemasangan PJU Jalan Poros	Batulicin		10 unit	
	• Pemasangan PJU Jalan Poros	Sungai Loban		10 unit	
	• Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Mantewe		25 unit	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Satui	Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai	28,57%	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	Satui	Persentase dermaga yang dibangun	75,00%	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Satui	Jumlah dermaga yang dibangun	1 Unit	
	• Pembangunan Dermaga	Satui		1 Unit	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan Nasional Dinas Perhubungan pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKPD adalah **“Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Untuk Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan”**. Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas.

Kemudian pada tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJPD tahun 2006-2025 dan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKPD Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yaitu **“Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis”**. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Berakhlak Mulia
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2022 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Untuk tahun 2022 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 10 Fokus Pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton

- f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang jalan tol baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
 - f. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta local champion literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penurunan emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
 - b. Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat

reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Tingkat kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%
 - c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
 - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
 - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
 - b. Insidensi TB 231/100.000 penduduk
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
 - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
 - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
 - f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
 - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
 - h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %

6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

Kemudian pada tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2022 berpedoman pada dokumen RPJPD tahun 2006-2025 dan Dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2022 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2022 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yaitu “**Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis**”. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Sedangkan rumusan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah “**Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Untuk Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

1. **Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
 - a. Perbaikan Kualitas dan Akses Penyelenggaraan Pendidikan secara Luas;
 - b. Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan;
 - c. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - d. Peningkatan Upaya Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular;

- e. Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting;
 - f. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja;
 - g. Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Daya Saing Pemuda;
 - h. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga;
 - i. Peningkatan Layanan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan;
 - j. Peningkatan Akses dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Perempuan;
 - k. Peningkatan Akses, Perlindungan, Pemberdayaan dan Pelayanan Bagi Kelompok Disabilitas, dan Lansia;
 - l. Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat.
2. **Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
- a. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan;
 - b. Peningkatan Produktifitas Pangan;
 - c. Peningkatan Jumlah Investor dan Nilai Investasi;
 - d. Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil;
 - e. Peningkatan Kunjungan Wisatawan;
 - f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi;
 - g. Percepatan Penurunan Kemiskinan;
 - h. Perlindungan PMKS;
 - i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial;
 - j. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.
3. **Pembangunan Infrastruktur yang terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
- a. Peningkatan Sarana Prasarana Strategis Perkotaan;
 - b. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru;
 - c. Peningkatan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas;
 - d. Penurunan Luasan Kawasan Kumuh;
 - e. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Aman;
 - f. Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi Layak;
 - g. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman;

- h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir;
 - i. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana;
 - j. Pengembangan Fungsi Ruang Terbuka;
 - k. Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
4. **Pembangunan Masyarakat yang Agamis**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:
- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan;
 - b. Peningkatan Pembinaan dan Fasilitas Kegiatan Keagamaan Perorangan/Kelompok;
 - c. Peningkatan Musyawarah Antar Umat Beragama;
 - d. Peningkatan Pembinaan Pasangan Usia Subur;
 - e. Pembangunan Rumah Tahfiz di setiap Desa.
5. **Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional**, dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
 - b. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima;
 - c. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
 - d. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah;
 - e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah;
 - f. Peningkatan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - g. Peningkatkan Status dan Kemajuan Kemandirian Desa;
 - h. Peningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Dasar Bagi Pembangunan Desa
 - i. Mendukung Percepatan Penyederhaan Birokrasi.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Makro yang ditetapkan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022, antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.72 - 0.78 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.02 - 5.88 %
3. Indeks Kesolehan Sosial 68.00 - 68.58
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71.91 - 72.15
5. Infrastruktur yang Mantap 52.06 - 56.98 %
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 4.29 - 4.19 %
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 76.15 - 76.83
8. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi 60.69 - 60.91 (CC)
9. PDRB Sub Sektor Pertanian (ADHB) 1.64 - 2.50 %
10. PDRB Sub Sektor Perikanan (ADHB) 3.56 - 3.72 %
11. PDRB Sub Sektor Perkebunan (ADHB) 1.06 - 2.24 %
12. PDRB Sub Sektor Peternakan (ADHB) 1.90 - 2.26 %
13. PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB) 0.36 - 5.84 %
14. Pertumbuhan Investasi 9.96 - 10.02 %

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan mendukung pencapaian prioritas ke 3 (tiga) yaitu **“Pembangunan Infrastruktur yang terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan”**.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, yaitu : Meningkatkan keselamatan transportasi, dengan indikator tujuan **“Mewujudkan peningkatan kualitas layanan transportasi”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan dan lalu lintas angkutan orang dan barang”**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

Persentase meningkatnya fasilitas keselamatan jalan; Kinerja Lalu lintas kabupaten / kota; dan Rasio konektifitas kabupaten / kota

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN : Meningkatkan keselamatan transportasi	Menurunnya angka pelanggaran angkutan jalan	%	38,03%
SASARAN : Terwujudnya lalu lintas transportasi yang berkeselamatan	Terpenuhinya fasilitas transportasi yang berkeselamatan	%	14,65%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, 2021

Demikian pula dalam Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM / Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		P
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017									
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum		√	191826	206313	221895	238653	50570	38509	23938
2	Rasio ijin trayek		√	0,0011	0,0011	0,0011	0,0011	0,001	0,0009	0,001
3	Jumlah uji kir angkutan umum		√	2158	2628	3200	3896	2158	4	8401
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		√	5	5	5	5	5	5	5
5	Persentase layanan angkutan darat		√	1,81	1,95	2,1	2,27	1,81	5,03	1,16
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		√	10,34	13,12	16,66	21,14	10,36	97,93	42,98
7	Pemasangan Rambu- rambu		√	8,52	11,54	15,62	21,16	8,52	0,45	8,95
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		√	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,01	0,022
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		√	191826	206313	221895	238653	21280	7674	3313
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun		√	227984	235275	242799	250564	50570	38509	23938
B	Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020									
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota		√	93	93,73	94,46	95,2	93	94	94
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		√	0,22	0,24	0,27	0,3	0,22	0,32	0,32

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH BUMBU

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 serta Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Secara khusus, Dinas Perhubungan memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “**Mewujudkan Peningkatan kualitas Layanan Transportasi** dan indikator sasaran
 - 1) Persentase meningkatnya fasilitas keselamatan jalan
 - 2) Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota
 - 3) Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan;
5. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk penyesuaian terhadap dampak pandemi COVID-19.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 adalah sebanyak 3 (tiga) program, yang terdiri dari 1 (satu) program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 2 (dua) Program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2022 adalah sebanyak 12 kegiatan, dan 27 sub Kegiatan;
3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 24.221.727.643 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, dengan perincian :
 - a. Rp 20.579.546.953 untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin).
 - b. Rp. 3.642.180.690 untuk program dan kegiatan pelaksanaan/ pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju
Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pa Indikati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	100%	20.579.54
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	Kab. Tanah Bumbu	100%	6.951.00
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	4.921.07
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	2.029.93
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib administrasi dan disiplin Pegawai Perangkat Daerah	Kab. Tanah Bumbu	100%	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	Kab. Tanah Bumbu	161 stell	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Tanah Bumbu	100%	514.37
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	99
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Tanah Bumbu	27 unit	98.73
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	112.70
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	13.73
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Kab. Tanah Bumbu	24 Exm	2.64
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tanah Bumbu	60 OK	285.57
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Kab. Tanah Bumbu	31,65%	18.00
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kab. Tanah Bumbu	25 unit	18.00

2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tanah Bumbu	100%	12.576.820
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat Menyurat	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	35.34
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	12.193.260
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	10.650
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	337.560
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik	Kab. Tanah Bumbu	19,57%	519.345
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	Kab. Tanah Bumbu	12 bulan	254.760
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	Kab. Tanah Bumbu	4 Unit	53.860
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ terpelihara	Kab. Tanah Bumbu	1 Unit	210.710
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Terpenuhinya Fasilitas Perengkapan Jalan dan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Jalan	Kab. Tanah Bumbu	62,12%	3.415.460
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan kabupaten yang memenuhi syarat teknis keselamatan keamanan dan kenyamanan	Kab. Tanah Bumbu	14,65%	1.137.660
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rambu rambu Lalu Lintas yang terpasang	Kab. Tanah Bumbu	336 Unit	887.660
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Yang dipelihara	Kab. Tanah Bumbu	1927 Unit	250.000
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase terminal yang dikelola	Kab. Tanah Bumbu	32,26%	776.190
2.15.02.2.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah terminal yang dibangun	Kab. Tanah Bumbu	1 unit	394.710
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dibangun	Kab. Tanah Bumbu	3 unit	216.210
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang di pelihara/ direhabilitasi	Kab. Tanah Bumbu	2 unit	165.260
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Izin Parkir yang diterbitkan	Kab. Tanah Bumbu	75 titik	208.165
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya fasilitas parkir publik yang terintegrasi	Kab. Tanah Bumbu	20 Buah	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanah Bumbu	40 OK	208.165

2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang laik jalan	Kab. Tanah Bumbu	22,00%	390.839.430
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Kab. Tanah Bumbu	1 Unit	-
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik)	Kab. Tanah Bumbu	6000 Buah	276.309.430
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana PKB yang dipelihara	Kab. Tanah Bumbu	12 Unit	114.530.000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang	Kab. Tanah Bumbu	63,27%	902.606.050
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin dan Rekomendasi Angkutan Orang/Barang yang aktif	Kab. Tanah Bumbu	310 Izin	-
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan Pengawasan LLAJ	Kab. Tanah Bumbu	120 OK	902.606.050
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase trayek yang ditetapkan	Kab. Tanah Bumbu	83,33%	-
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan	Kab. Tanah Bumbu	1 Izin	-
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran Sungai	Kab. Tanah Bumbu	28,57%	226.715.000
2.15.03.2.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan	Jumlah Ijin Usaha Angkutan Sungai Yang di Terbitkan	Kab. Tanah Bumbu	1 Izin	-
2.15.03.2.02.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan	Kab. Tanah Bumbu	45 OK	-
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengeroperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase dermaga yang dibangun	Kab. Tanah Bumbu	75,00%	226.715.000
2.15.03.2.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengeroperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pelabuhan	Kab. Tanah Bumbu	5 Izin	-
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah dermaga yang dibangun	Kab. Tanah Bumbu	2 Unit	226.715.000
2.15.03.2.13.03	Pengeroperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan sungai yang dipelihara	Kab. Tanah Bumbu	2 Unit	-
2.15.03.2.13.04	Pengawasan Pengeroperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pengawasan Pelabuhan Sungai	Kab. Tanah Bumbu	15 OK	-
2.15.03.2.17	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Ijin Pengerukan yang dikeluarkan	Kab. Tanah Bumbu	0,00	-
2.15.03.2.17.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengerukan	Kab. Tanah Bumbu	0	-
2.15.03.2.19	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Ijin Pengelolaan TUKS	Kab. Tanah Bumbu	6 Izin	-
2.15.03.2.19.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan TUKS	Kab. Tanah Bumbu	15 OK	-
JUMLAH					24.221.727.643

BAB V

PENUTUP

BAB V

P E N U T U P

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Perhubungan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini berpedoman pada Rancangan Awal Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Perhubungan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022;
2. berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 untuk setiap triwulannya;
2. Pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2022 dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Dengan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2022.

Batulicin, Juni 2022

Plt. KEPALA SKPD

ACHMAD MARLAN, S.Sos
NIP. 19650315 199203 1 019